

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Contentious Politics dalam menciptakan momen serta gerakan kolektif merupakan hasil dari kesadaran setiap masyarakat yang ingin mempunyai andil di dalam menciptakan klaim terhadap pemerintah melalui mural. Perjalanan mural sebagai media perlawanan sangat panjang, mulai dari zaman pra sejarah hingga saat ini baru ketika pada modern setelah ditemukan cat dan pilox mural menjadi karya seni yang diminati banyak orang. Untuk melihat *contentious politics* harus memenuhi 3 ciri umum yaitu persetujuan, tindakan kolektif dan politik.

Persetujuan dapat kita lihat pada mural kritik saat terjadinya klaim yang dibuat oleh masyarakat melalui mural yang isinya adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah yang gagal dalam menangani Covid-19 serta membawa kesejahteraan kepada masyarakat di situasi genting. Persetujuan ini juga dapat dibangun ketika terdapat orang yang merasa bahwa suatu hal menjadi permasalahan yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Klaim ini hadir karena masyarakat tidak mempunyai akses secara langsung untuk mengganti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Aksi kolektif kita dapat lihat dari hadirnya lomba mural “Dibungkam” oleh Gejayan Memanggil dimana tindakan kolektif ini benar benar sampai di beberapa daerah di Indonesia ikut serta dalam mengirimkan karyanya. Karena ini merupakan salah satu wadah kolektif yang terorganisir dengan baik sehingga menciptakan kesadaran bagi orang yang ikut lomba mural ini bahwa mereka bergerak secara kolektif dan memiliki pendapat atau ekspresi dari masyarakat yang tidak bisa terwakilkan.

Politik dapat kita lihat pada penggunaan sarana pemaksaan seperti tentara dan polisi merupakan salah satu bukti bahwa memang klaim yang dilontarkan masyarakat mengganggu jalannya pemerintahan. Hal ini membuat pemerintah menggunakan hak untuk mengendalikan seseorang dengan cara-cara represif. Untuk membuat masyarakat menjadi takut untuk berpendapat sehingga iklim ketakutan muncul ditengah masyarakat disaat mereka ingin menyuarakan pendapat di ruang publik. Reaksi yang dilakukan aparat di lapangan dengan represif dan agresif, menunjukkan ciri-ciri negara otoritarian dalam melihat kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang publik.

Kehadiran lomba mural “Dibungkam” merupakan sebuah angin segar bagi masyarakat, dalam meningkatkan keterlibatan mereka untuk menggunakan mural sebagai media perlawanan. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan mudah dan tentunya diberikan wadah secara kolektif di dalam membuat klaim untuk pemerintah. Aksi kolektif ini mendapatkan respon dari pemerintah yang berlebihan. Penggunaan sarana pemaksaan yang bertindak represif dan agresif terhadap mural kritik, membuat pemerintah Indonesia terlihat sebagai ciri negara otoritarian.

Penurunan demokrasi akan terus terjadi apabila tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak diubah, serta terus dipelihara sebagai hal yang lumrah ketika melakukan pembatasan tersebut. Sehingga lomba mural “Dibungkam” berhasil memunculkan wajah pemerintah yang anti kritik, serta memperlihatkan kepada masyarakat bahwa praktik demokrasi mereka sudah tercoreng oleh pemerintah.

5.2 Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat peneliti jabarkan.

Saran yang pertama untuk pemerintah, saran ini khusus perihal adanya evaluasi terhadap permasalahan penyempitan ruang publik. Dimana penyempitan ruang publik ini membatasi masyarakat dalam menyampaikan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sehingga menimbulkan stigma negatif yang dapat menurunkan kepercayaan publik dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Selanjutnya harus adanya pembekalan terhadap pegawai pemerintah untuk terus belajar mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Karena melihat kejadian penghapusan mural secara sewenang-wenang membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana pengetahuan pemerintah terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sudah dilindungi oleh konstitusi.

Selanjutnya adalah harus adanya keterlibatan publik di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang dibikin tepat sasaran serta harus terjadinya pembukaan seluas-luasnya terhadap ruang publik sebagai medium dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi di muka umum.

Saran yang kedua ditunjukkan kepada TNI dan Polri sebagai aparat keamanan penegak hukum, dimana harus adanya transformasi perihal tindakan represif yang ada di lapangan, karena stigma masyarakat melihat TNI dan Polri menjadi garda terdepan ketika ada tindakan represif yang dilakukan secara agresif. Ini menjadi evaluasi agar kejadian pembungkaman mural serta penyampaian pendapat melalui medium yang lain tidak mendapatkan tindakan yang berlebihan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan rasa aman ketika menyuarakan pendapat mereka di ruang publik.